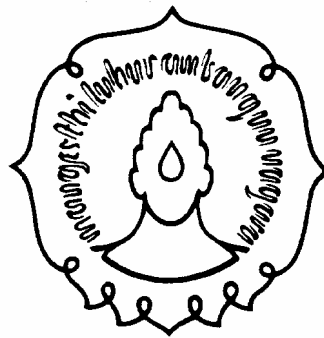


**Pelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 6 tahun 2002 tentang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di kota
surakarta**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Pradjawan Doddy Rahardjo
E.1101050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA**

Disusun Oleh :

PRADJAWAN DODDY RAHARDJO

NIM : E. 1101050

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

Sugeng Praptono, SH.M.H

Maria Madalina, SH. M.Hum

NIP. 131 411 016

NIP. 131 597 041

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA**

Disusun Oleh :

PRADJAWAN DODDY RAHARDJO

NIM : E. 1101050

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. (Aminah, S.H., M.H.) :
Ketua
2. (Maria Madalina, S.H., M.Hum.) :
Sekretaris
3. (Sugeng Praptono, S.H., M.H .) :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.HUM.
NIP. 131 570 154

ABSTRAK

PRADJAWAN DODDY RAHARDJO, 2008. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di kota Surakarta, selain itu juga untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Perpindahan Penduduk, Tamu. Sedangkan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :Masyarakat masih banyak yang belum mengerti prosedur penerbitan kartu kependudukan dan akta-akta catatan sipil,Banyak warga masyarakat yang memiliki KTP dan KK ganda,Banyak tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam tapi tidak melapor, Warga masyarakat masih banyak yang belum sadar akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil. Solusi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : Memasang gambar alur penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan sipil di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan membuka *line* telepon bagi masyarakat umum, Diadakan Pendataan KTP atau KK, Dipasang pasang pengumuman tamu menginap 1x 24 jam wajib lapor di setiap desa atau kelurahan, Diadakan sosialisasi dan berbagai penyuluhan mengenai arti penting dan manfaat akta-akta catatan sipil.

MOTTO

”Kata-Kata tidak bermakna, manusia yang memberi makna, tetapi kata dapat merubah jiwa dan manusia, dan sesungguhnya pada jiwa yang berubah terletak perubahan niscaya bagi dunia dan Akherat

(M Fauzil Adhim)

You’ll Never Walk Alone.

(Liverpudlian)

Pengetahuan adalah satu-satunya tirani kekayaan yang tidak dapat dirampas, hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuan yang ada dalam dirimu, dan memiliki sedikit pengetahuan namun digunakan untuk berkarya jauh lebih berarti dari pada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi

(Kahlil Gibran)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini hendak penulis
persembahkan kepada :

- Allah SWT Sang Raja Manusia
- Nabi Muhammad SAW
- Papi dan Ibu yang selalu tulus bersabar
dan doa yang tiada hentinya untukku
- Mbak Otiék dan Mas Prayit, Mbak Holly,
Mas Cicuk dan Mbak Hening, serta
Keponakanku Tito dan Aldi atas segala
doa dan kebersamaan yang tiada hentinya
- Masa Depan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kata syukur yang selalu penulis panjatkan kepada penguasa alam ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Surakarta

Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujuan kepada ::

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sugeng Praptono ,S.H. MHum selaku Pembimbing I penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Ibu Maria Madalina, S.H. MHum selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberikan bimbingannya.
4. Ibu Aminah, S.H MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Ibu Wida Astuti, S.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
7. Ibu Dra Rita Margaretha, selaku Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.

8. Saudara-saudaraku tercinta Mas nunung, Om woto sekeluarga, Om Wahyono sekeluarga, Om Edy sekeluarga, Gita, Mas Pur, Mas Kris, Pakdhe Sam, Budhe Tarti, Me Oko yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan study
9. Sahabatku : Andi, Hanindyo Panji, Pandu, Entus, galih, Sion, Ganyang, Himen, Welly, Elvira, Icha, Intan yang tak henti-hentinya selalu mengingatkan akan suatu kewajiban untuk masa depan yang lebih berharga
10. Teman-temanku Agusta, Cokak, Tezar, serta De Droit FC, Get Ivory, Cepax FC di Soember yang telah memberi kebanggaan dalam hidup dan kenyataanku
11. Teman-teman angkatan 2001 Non Reguler FH UNS
12. Orang-orang Legend di Dunia dan Akherat dengan Kuil Cinta-Nya
13. Indonesia-ku.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, Februari 2008
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Kependudukan.....	19
3. Tinjauan Umum tentang Catatan Sipil.....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Diskripsi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.....	32
1. Sejarah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.....	32
2. Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.....	33

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.....	36
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil	43
1. Pendaftaran Penduduk.....	44
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51
C. Faktor-Faktor Penghambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	64
1. Faktor Penghambat.....	64
2. Solusi.....	68
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif
..... 10

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran
..... 30

Gambar 3 : Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota
Surakarta
..... 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II.	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan A Catatan Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat, tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara namun berbentuk pemerintahan daerah yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan pemerintahan daerah itu sendiri dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang sah. Paradigma pemerintah sebagai *a governing process* ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintah dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang

berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini (Rasyid, 1997:20).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonom saat ini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum

1

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti

otentik yang sifat bukti itu dapat untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Di Surakarta sendiri telah diatur tentang kewajiban setiap penduduk untuk memiliki akta catatan sipil. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki akta catatan sipil. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaatinya.

Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Akta catatan sipil yang paling banyak diabaikan adalah akta kematian. Padahal akta kematian tidak kalah pentingnya dengan akta-akta catatan sipil yang lain. Selain itu masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitannya. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mengurus prosedur untuk penerbitan akta-akta catatan sipil sulit, sehingga tidak jarang dari mereka yang hendak mengurus prosedur penerbitan akta catatan sipil menggunakan jasa “Calo”. Padahal jika dikaji sebenarnya prosedur penerbitan akta catatan sipil tidaklah sulit.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan akta catatan sipil di Kota Surakarta. Khusus di bidang catatan sipil mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bidang pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis di atas, maka penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan judul ” **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA**”.

B. Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di kota Surakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di kota Surakarta
 - b) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah dalam kaitanya dengan kinerja Dinas Pariwisata.
 - b) Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, terutama mengenai

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian” (Winarno Surachman, 1990 : 26).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat empiris sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori- teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain :

- a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam penelitian.

b) Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian atau studi kepustakaan.

6. Sumber data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

a) Sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

b) Sumber data sekunder yang terdiri dari :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

(a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa : Wawancara (Interview) yang disertai dengan daftar pertanyaan.

Wawancara disini maksudnya adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai pejabat atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang ditunjuk. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. Yang menjadi responden dalam wawancara ini adalah Ibu Dra Rita Margaretha selaku Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Bina Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

b) Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan

publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002 : 103). Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah :

a) Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

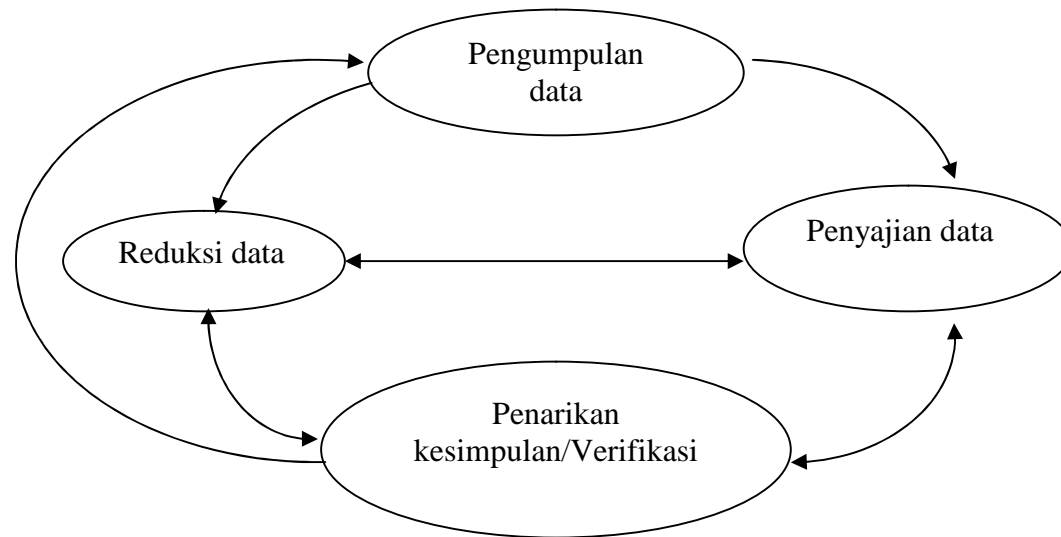
b) Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan,

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37).



Gambar 1 : Model Analisis Interaktif

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002 :13).

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, Tinjauan umum tentang Kependudukan dan Tinjauan Umum tentang Catatan Sipil. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, yaitu : pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil , dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a) Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

a) Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama, dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu negara. Fungsi pelayanan, dan pengaturan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didistribusikan secara sentral dan lokal, agar benar-benar aspiratif baik kepentingan nasional maupun tuntutan heterogenitas lokal. Dengan adanya Pemerintah Daerah akan memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumberdaya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang, 2002: 3).

Menurut Sarundajang (2002: 22-25) pada umumnya negara-negara di dunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari pemahaman peran pemerintah daerah di negara masing-masing. Secara historis asal-usul Pemerintah Daerah yang kita kenal berakar dari eropa di abad ke-11 dan ke-12. Pemerintah Daerah memiliki ciri yakni wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat perturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya.

Konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi negara berwujud sentralisasi, dekonsentrasi dan

desentralisasi. Keputusan politik disebut keputusan alokasi, sedangkan keputusan administratif dikenal dengan keputusan pelaksanaan (Hanif Nurcholis, 2005: 2). Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dapat bervariasi menjadi (1) Sentralisasi penuh yakni keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hierarki secara terpusat; (2) Dekonsentrasi apabila keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah; (3) Desentralisasi, jika keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah.

Sehubungan dengan sifat keuniversalan Pemerintahan Daerah (*local self government*) di beberapa negara terkandung di dalamnya ciri-ciri sebagai berikut (Sarundajang, 1999: 27). *Pertama*, Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri sehingga urusan-urusannya perlu ditegaskan secara rinci; *Kedua*, Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, akan tetapi pegawai Pemerintah Daerah; *Ketiga*, Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri; *Keempat*, Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan; *Kelima*, Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

b) Pemerintah Daerah di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara kesatuan, maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti negara federal/serikat. Pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya adalah dekonsentrasi dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat yang memegang kekuasaan penuh (Hanif Nurcholis, 2005: 5). Mengingat Negara Indonesia sangat luas yang terdiri dari puluhan ribu pulau besar

dan kecil dan penduduknya terdiri beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda-beda, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tetapi desentralisasi.

Pengkajian tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia dewasa ini harus diawali dari ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. Ketentuan dimaksud terdapat di dalam Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B Perubahan Kedua UUD 1945 (2000). Perubahan tersebut berimplikasi kepada Penjelasannya, karena selama ini Penjelasan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh dan seringkali dijadikan acuan dan dasar dalam mengkaji sistem pemerintahan daerah (Djuanda, 2004: 237). Di dalam Pasal 18 yang baru tersebut terkandung paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah, yaitu (Bagir Manan, 2001: 7-17):

- 1) Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 lama tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya;
- 2) Pasal 18 ayat (5) mengandung prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini sebenarnya sewaktu BPUPKI menyusun rancangan UUD telah nampak dari pidato Ratulangi yang menyebutkan “supaya daerah diberikan hak seluas-luasnya untuk mengurus keperlunyaannya sendiri.” Kehendak ini juga ditegaskan dalam UUDS 1950 Pasal 131 ayat (2);
- 3) Pasal 18A ayat (1) mengandung prinsip kekhususan dan keberagaman daerah;
- 4) Pasal 18B ayat (2) mengandung prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;

- 5) Pasal 18B ayat (1) mengandung prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- 6) Pasal 18 ayat (3) mengandung prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum; dan
- 7) Pasal 18A ayat (2) mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Selain prinsip-prinsip tersebut, yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah isi Pasal 18 ayat (4) yang mengandung prinsip demokrasi di dalam menetapkan seorang pemimpin daerah. Dalam UUD 1945, sengaja menggunakan kata “*Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis*”. Maksud dari Pasal tersebut untuk memberikan alternatif ke depan bahwa pemilihan Kepala Daerah selain dapat dilakukan melalui DPRD juga dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung. Perumusan yang demikian dapat dipahami karena secara historis Pasal 18 ayat (4) tersebut dibuat sebelum adanya perubahan terhadap Pasal 6 khususnya penambahan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tentang “*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*” (Juanda, 2005: 239).

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui undang-undang. Dewasa ini undang-undang yang berlaku adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ada empat prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undang-undang tersebut, yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi menunjuk kepada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tugas pembantuan

merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

- 2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dengan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Cara penyerahan kewenangan dilaksanakan menurut *general competence*. Dalam undang-undang ditentukan bahwa kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan-urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten adalah di luar yang ditentukan pemerintah pusat yakni:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang;

- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan di bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;
- 7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten;
- 8) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 9) Pengendalian lingkungan hidup;
- 10) Pelayanan pertanahan;
- 11) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 12) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 13) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 14) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- 15) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan

berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara

b) Tinjauan Umum Tentang Kependudukan

a) Pengertian Penduduk

Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 6).

b) Pengertian Pencatatan Penduduk

Pencatatan penduduk adalah pencatatan kependudukan / kewarganegaraan oleh Pemerintah yang memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum keperdataan dari diri seseorang. (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 6)

c) Perpindahan penduduk

Perpindahan penduduk adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tinggal atau tempat menetap.

d) Pengertian Pendaftaran penduduk

Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan pendudukserta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan. (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 6).

e) Macam-Macam Akta / Surat Pencatatan Penduduk

Akta maupun surat pencatatan penduduk sangat beragam jenisnya. Akta maupun surat pencatatan penduduk antara lain :

1) Kartu Keluarga (KK)

Adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Adalah kartu yang memuat data kependudukan seseorang dan berlaku sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk

3) Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tinggal atau tempat menetap

4) Surat Keterangan Kelahiran

- 5) Surat Keterangan Lahir Mati
- 6) Surat Kematian
- 7) Perubahan Status Kewarganegaraan
- 8) Mutasi Biodata
- 9) Perubahan Status Kependudukan
- 10) Kartu Identitas Anak (KIA)

Adalah kartu bukti diri yang sah yang diberikan kepada setiap penduduk yang belum genap berusia 17 tahun dan membutuhkannya untuk berbagai kepentingan dan atau keperluan khusus

- 11) Kartu Identitas Tamu (KIT)

adalah kartu yang memuat data kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal di wilayah kota surakarta dan tidak ingin menjadi penduduk tetap

- 12) Akta Kelahiran
- 13) Akta Kematian
- 14) Akta Perkawinan
- 15) Akta Perceraian
- 16) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

(Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 :14)

c) Tinjauan Umum tentang Catatan Sipil

a) Pengertian Catatan Sipil

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga “*Burgerlijk Stand*” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan / Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. Mr Lie Oen Hoeck Lembaga Catatan Sipil, adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian

hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian” .

Sedangkan R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “ Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan”.

b) Pengertian Akta Catatan Sipil

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84 Akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat atau akta itu (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 9)

Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 9).

c) Sejarah Catatan Sipil

Menurut sejarah.lembaga yang dulunya hanya bernama “*Burgerlijk Stand*” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil ini berasal dari negeri Belanda, sedangkan Negara Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari

pemerintah Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia adalah Negara jajahan Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Dan pengaruh dari semua itu adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturan – peraturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.

Pada jaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai Catatan Sipil adalah bersifat *Pluralistis* dan masih membedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut adalah :

- (1) Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
- (2) Penduduk golongan Timur Asing. Golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan. Yaitu :
 - (a) Golongan Tionghoa (Cina)
 - (b) Golongan Non Tionghoa
- (3) Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu :
 - (a) Golongan Indonesia Asli
 - (b) Golongan Indonesia Kristen

Penggolongan penduduk ini didasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 *Indische Staatregeling* yang merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan Catatan Sipil yang berlaku di Indonesia.

Keadaan ini berakhir pada tahun 1967 berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember

1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan Sipil ”terbuka” untuk umum, khususnya untuk mengenai akta kelahiran dan kematian.

d) Tugas dan Fungsi Kantor Catatan Sipil

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil disebutkan bahwa :

- (1) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Catatan Sipil adalah :
 - (a) Penyelenggaraan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak.
 - (b) Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
 - (c) Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Kemudian dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa “ Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur DKI Khusus Ibukota Jakarta ”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- (1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- (3) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- (4) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (5) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- (6) Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- (7) Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya. pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan : “ Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil”. Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- (1) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- (3) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak.
- (5) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil.
- (7) Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil.

Melakukan Urusan Tata Usaha

e) Asas Pencatatan Sipil

Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Unity* (Nasional dan Internasional)

Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.

2) Pencatatan di tempat peristiwa terjadi

Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor di tempat peristiwa tersebut terjadi.

3) Garis keturunan

Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

4) Pribadi / perorangan

Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

5) Berlaku sepanjang masa

Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selama-lamanya (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 :10).

f) Macam-Macam Akta Catatan Sipil

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor. 6 tahun 2002 dijelaskan bahwa yang merupakan akta catatan sipil adalah akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan dan pengesahan anak.

1) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran terhadap dimana seorang anak itu dilahirkan yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya dan pihak lain di bidang kekeluargaan maupun warisan. (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2003 : 36)

Jenis akta kelahiran :

(a) Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran dalam batas waktu selambat – lambatnya : 60 hari kerja bagi WNI dan WNA bukan eropa, serta 10 hari bagi WNI dan WNA.

(b) Akta kelahiran terlambat pencatatan

Akta kelahiran terlambat pencatatan adalah Akta kelahiran yang diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran melebihi 60 hari kerja sejak kelahiran 1 Januari 1986

(c) Akta kelahiran Dispensasi

Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran yang terjadi sebelum tanggal 1 januari 1986

(d) Akta kelahiran Istimewa

Akta kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang melebihi batas waktu : 60 hari kerja bagi WNI dan WNA bukan eropa dan 10 hari kerja bagi WNI dan WNA eropa dimana proses penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan.

2) Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang bukan beragama islam sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Dimaksud dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2003 : 42)

3) Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2003 : 46)

4) Akta Kematian

Akta kematian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai nperistiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan. (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2003 : 48)

Jenis akta kematian :

(a) Akta kematian umum

Akta kematian umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 14 hari setelah kematian.

(b) Akta kematian istimewa

Akta kematian istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 14 hari setelah kematiannya.

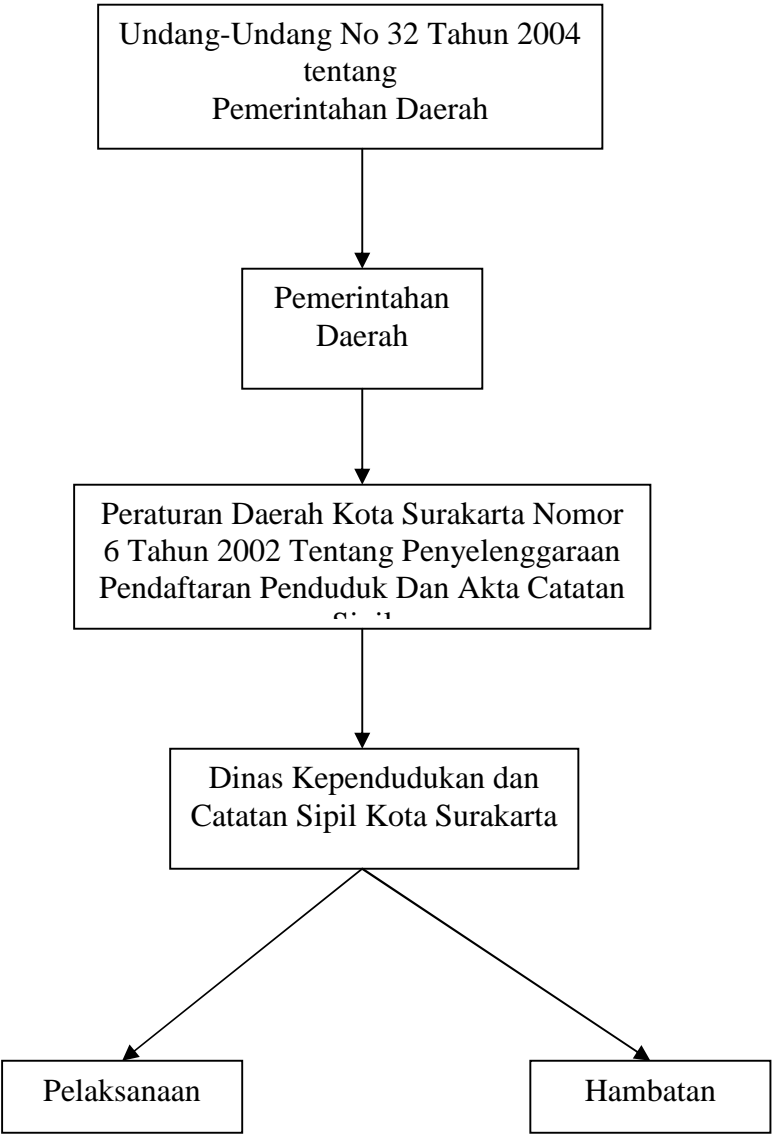
(c) Akta kematian dispensasi

Akta kematian dispensasi adalah akta kematian yang diberikan bagi WNI yang pencatatan kematiannya melampaui batas waktu 60 hari kerja

5) Akta Pengakuan dan Pengesahan anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa pengakuan dan mengesahkan anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya beserta keluarganya dan pihak lain di bidang kekeluargaan, warisan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2003: 49).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ada pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Untuk menciptakan tertib administrasi di Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. Dimana dalam peraturan daerah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang dikelola oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Disini penulis ingin menguraikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dan hambatan yang timbul dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Pada mulanya dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta berbentuk kantor yang bernama Kantor Catatan Sipil Surakarta. Kantor Catatan Sipil ini hanya membidangi satu tugas saja, yaitu tugas di bidang Pencatatan Sipil. Sedangkan fungsi Kantor Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a) Mengeluarkan produk yang berupa dokumen negara antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
- b) Pemeliharaan akta catatan sipil.
- c) Pengukuhan kepada masyarakat tentang Catatan Sipil.

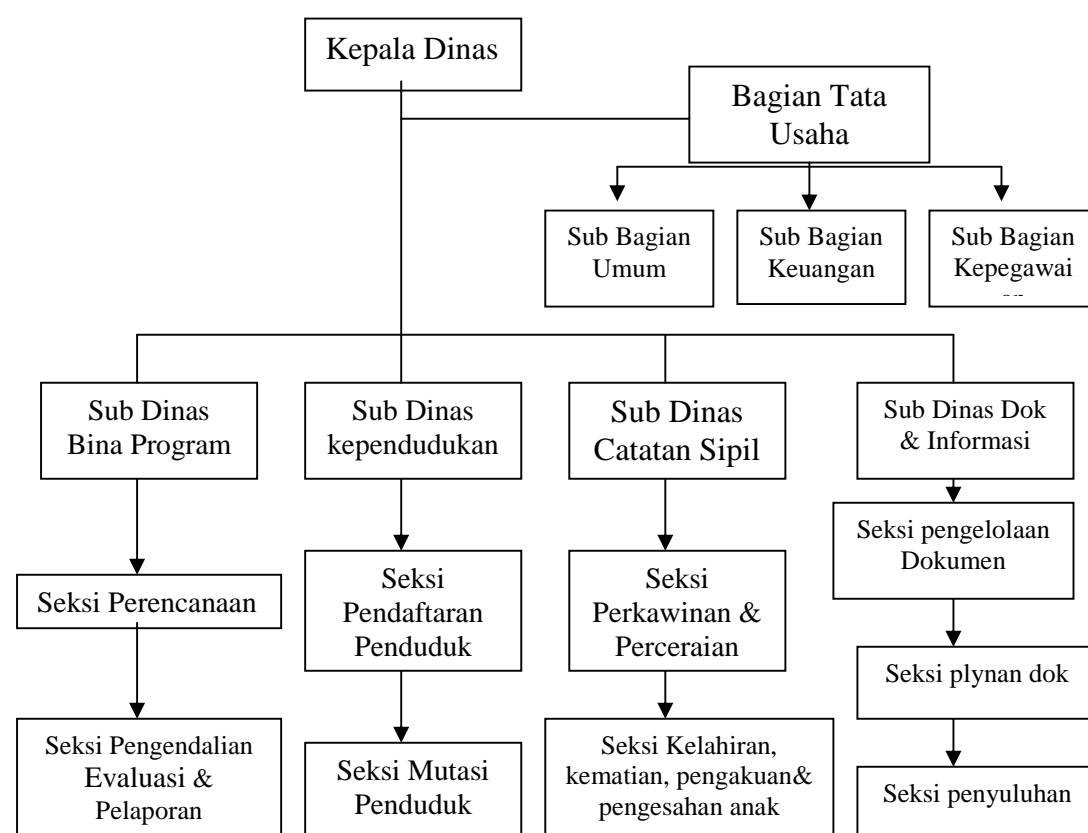
- d) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e) Penyediaan data atau informasi catatan sipil dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan.

Jadi pada mulanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta berbentuk kantor dan hanya membidangi satu tugas di bidang catatan sipil saja.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah penyesuaian sistem pemerintahan yang dulunya Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Sejalan dengan hal itu Otonomi Daerah di Surakarta diawaqli dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari 15 Dinas, lima Badan³² dan delapan Kantor. Dengan Dikeluarkannya Perda tersebut, maka *Nomenklatur* Kantor Catatan Sipil Surakarta berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan dasar pelaksanaan tugas diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak hanya bertugas di bidang catatan sipil saja, namun juga mengatur bidang kependudukan.

2. Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 3 : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta

Dari bagan struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa susunan organisasi Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kota Surakarta terdiri dari :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta saat ini adalah Bapak Drs. Bambang Hariono, S.H.

b) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dikepalai oleh Ibu Sriyani Mujiani, BSc. Bagian Tata Usaha ini terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum. Dikepalai oleh Bapak Suwito
- (2) Sub Bagian Kepegawaian. Dikepalai oleh Ibu Haryani, SE
- (3) Sub Bagian Keuangan. Dikepalai oleh Ibu Sri Sartini

c) Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program ini dikepalai oleh Ir Harjadi. Sub Bagian Bina Program terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan. Dikepalai oleh Ibu Dra Margaretha
- (2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. Dikepalai oleh Ibu Arinda Istiana, SH

d) Sub Dinas Kependudukan

Sub Dinas Kependudukan dikepalai oleh Ibu Dra Tri Tunggal Lestari. Sub Dinas Kependudukan ini terdiri dari :

- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk. Dikepalai oleh Bapak Renggo Sudarnoto
- (2) Seksi Mutasi Penduduk. Dikepalai oleh Bapak Sudarsana, SH

e) Sub Dinas Catatan Sipil

Sub Dinas Catatan Sipil Dikepalai oleh Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih. Terdiri dai beberapa bagian, yaitu :

- (1) Seksi Perkawinan dan Perceraian. Dikepalai oleh bapak Suwoto, SH
- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian. Dikepalai oleh Ibu Heny Ernawati, SH. MH

f) Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi

Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi dikepalai oleh Dra Siti Anggrahini. Sub Dinas Dokumentasi ini terdiri dari :

- (1) Seksi Pengelolaan Dokumen. Dikepalai oleh Bapak Harjadi SE
- (2) Seksi Pelayanan Dokumen. Dikepalai oleh Ibu Betty Dwi Putri, SH
- (3) Seksi Penyuluhan. Dikepalai oleh Bapak Ahmad Ryadi, S.Sos

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

a) Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Sehubungan dengan banyaknya tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka disini penulis hanya akan menjelaskan uraian tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang berhubungan dengan penerbitan akta catatan sipil. Dalam hal ini adalah tugas dari Sub Dinas Catatan Sipil.

Tugas dari Kepala Sub Dinas Catatan Sipil diatur dalam Pasal 18 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan dan pelayanan akta – akta catatan sipil sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Adapun mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Sub Dinas Catatan Sipil berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang agar tercipta pemerataan tugas
- 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja.
- 7) Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
- 8) Menyelenggarakan pelayanan salinan akta, kutipan dan perubahan akta catatan sipil
- 9) Memberi petunjuk pengarahan kepada pemohon akta yang mengalami kesulitan.
- 10) Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan administrasi penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil
- 11) Menginventarisasi permasalahan – permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- 12) Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan
- 13) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas

- 14) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Dinas Catatan Sipil itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua bidang , yaitu :

- 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian

Tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian diatur dalam Pasal 19 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan pelayananan pencatatan perkawinan dan perceraian. Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (a) Menyusun rincian kerja seksi perkawinan dan perceraian berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan Sipil
- (b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
- (c) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.
- (d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.

- (e) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
 - (f) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.
 - (g) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan perkawinan dan perceraian.
 - (h) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian, serta mengatur jadwal pencatatan.
 - (i) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian termasuk penerbitan salinan kutipan dan perubahan.
 - (j) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - (k) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
 - (l) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak

Tugas Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak diatur dalam Pasal 20 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayananan pencatatan Kelahiran,

Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (a) Menyusun rincian kerja seksi kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan Sipil
- (b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
- (c) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.
- (d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- (e) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
- (f) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.
- (g) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan Anak.
- (h) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, serta mengatur jadwal pencatatan.
- (i) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak termasuk penerbitan salinan kutipan dan perubahan.
- (j) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- (k) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.

- (l) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- (m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya bagian Sub Dinas Catatan Sipil dalam hubungannya dengan akta catatan sipil adalah :

- (1) Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran
- (2) Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
- (3) Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
- (4) Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak
- (5) Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- (6) Menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta kematian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembuatan akta catatan sipil sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil. Dan juga dalam hal menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil serta sebagai perencana kebijakan di bidang kependudukan.

c) Kewenangan dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bagian muka, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang oleh pemerintah sengaja didirikan untuk mencatat dan menerbitkan akta catatan sipil, mengurus dan melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan sipil atau hukum keperdataan seseorang.

Mengenai kewenangan dan tanggung jawab pencatatan sipil, bahwa dulunya penyelenggaraan pencatatan sipil adalah merupakan tugas dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman cq Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan negeri. Tapi sekarang karena adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan pencatatan sipil merupakan tugas dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Jadi sekarang pencatatan sipil sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Dengan demikian, maka segala aktifitas dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pencatatan sipil telah mempunyai kekuatan hukum yang sah tanpa harus adanya legalisasi dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian segala akta catatan sipil, baik itu akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, serta akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah sah tanpa melalui sidang di Pengadilan Negeri.

Namun ada beberapa hal tentang pencatatan sipil yang masih memerlukan bantuan dari Pengadilan Negeri. Misalnya seperti pembuatan akta kelahiran dan kematian istimewa masih harus memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri. Juga pembuatan akta perceraian harus mendapat keputusan dari pengadilan negeri. Hal ini dilakukan agar terbukti tentang kebenaran peristiwa tersebut.

**B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002
Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi terhadap pelayanan penyelenggaraan di bidang pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di Kota Surakarta dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :

1. Pendaftaran Penduduk, yang meliputi :
 - a) Kartu Keluarga (KK)
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c) Perpindahan Penduduk
 - d) Tamu
2. Penyelenggaraan Catatan Sipil, yang meliputi :
 - a) Akta Kelahiran
 - b) Akta Kematian
 - c) Akta Perkawinan
 - d) Akta Perceraian
 - e) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Rita Margaretha selaku Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Bina Program Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 21 Januari 2008, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran penduduk

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dimaksud Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan pendudukserta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

Pendaftaran penduduk disini meliputi pendaftaran penduduk untuk Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), perpindahan penduduk, dan tamu.

a) Kartu Keluarga (KK)

Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Surakarta dan telah memenuhi syarat dapat untuk diberikan kartu keluarga. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan mengenai ketentuan atau kewajiban bagi warga masyarakat untuk memiliki Kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut berbunyi :

- 1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Surakarta dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Kartu Keluarga

- 2) Untuk mendapatkan kartu keluarga, kepala keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada Lurah melalui RT dan RW
- 3) Anggota yang tercantum dalam kartu keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Rita Margaretha proses penerbitan KK di Kota Surakarta dapat dilakukan di kelurahan, kecamatan atau kota berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta. untuk pelayanan KK bagi WNI dilaksanakan di Kelurahan, Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, sedangkan untuk WNA pelayanan untuk KK harus dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Proses penerbitan KK adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :
 - (a) Surat pengantar dari RT/RW;
 - (b) Melampirkan fotocopy buku nikah/kutipan akta kawin, bagi penduduk yang sudah menikah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - (c) Melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran bagi semua keluarga dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - (d) Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga;
 - (e) Khusus untuk WNI yang baru pindah dan datang dari luar negeri wajib membawa surat keterangan pendaftaran kedatangan dari luar negeri
 - (f) Apabila ada anak angkat, maka harus dengan salinan penetapan Pengadilan negeri tentang Pengangkatan anak
- 2) Petugas akan menerima dan meneliti berkas persyaratan

- 3) Petugas akan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP)
- 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta akan menerbitkan KK dan menyerahkan kepada pemohon
- 5) Jangka waktu penyelesaian KK adalah 30 (tiga puluh hari) kerja sejak tanggal permohonan diterima dan memenuhi persyaratan

Besarnya retribusi untuk pembuatan KK ini adalah sebesar Rp. 5.000,- bagi WNI dan Rp. 75.000,- bagi WNA.

Prosedur penerbitan kartu keluarga (KK) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk adalah kartu yang memuat data kependudukan seseorang dan berlaku sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk. Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan bahwa : *”penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP”*. Saat ini kesadaran dari masyarakat Kota Surakarta untuk mendapatkan KTP cukup tinggi. hal ini diketahui dengan jumlah pemohon KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tiap tahunnya selalu meningkat.

Di Kota Surakarta penduduk yang telah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dan tidak terlibat dengan organisasi terlarang dapat diberikan KTP seumur hidup. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai tanda pengenal yang sah serta keterangan domisili yang sah. Proses penerbitan KTP dapat dilakukan di Kelurahan, Kecamatan atau kota sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta.

Untuk mendapatkan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta prosedurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengisi formulir biodata atau mengisi formulir perubahan biodata penduduk
- 2) Pemohon melampirkan surat pengantar dari RT/RW
- 3) Pemohon melampirkan fotocopy KK
- 4) Pemohon yang hendak memperpanjang KTP harus menyerahkan KTP yang lama
- 5) Pemohon melampirkan fotocopy akta nikah/akta kawin
- 6) Apabila penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah harus melampirkan akta nikah
- 7) Petugas akan menerbitkan, mensahkan dan menyerahkan KTP kepada pemohon. Jangka waktu penyelesaiannya adalah tujuh hari kerja
- 8) Besarnya retribusi untuk pembuatan KTP ini adalah sebesar Rp. 5.000,- bagi WNI dan Rp. 50.000,- bagi WNA

Biasanya jangka waktu untuk pembuatan KTP ini apabila syaratnya sudah lengkap dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua hari. Biasanya keterlambatan penerbitan KTP disebabkan oleh kurangnya syarat-syarat oleh pemohon itu sendiri.

Berikut ini adalah jumlah pemohon KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2007.

No	Kecamatan	Jumlah Pemohon
1	Laweyan	2780
2	Serengan	2915
3	Pasar Kliwon	3488
4	Jebres	3180
5	Banjarsari	4060
	TOTAL	16423

c) P
e
r
p
i
n
d

ahan Penduduk

Perpindahan penduduk yang dimaksud disini adalah perubahan alamat sebagai akibat dari pindah tempat tinggal. Apabila terjadi perpindahan tempat pada sebuah keluarga, KK dan KTP yang dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan wajib diserahkan kembali dan dicabut. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dimana dalam Pasal 10 tersebut tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) Apabila terjadi perpindahan sebuah keluarga, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk yang dimiliki keluarga yang bersangkutan wajib diserahkan kembali atau dicabut.
- 2) Apabila terjadi perpindahan sebagian anggota keluarga dan yang pindah memiliki KTP, maka KTP-nya wajib diserahkan kembali / dicabut.

Sedangkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta

Catatan Sipil dijelaskan juga mengenai kewajiban untuk memiliki KK dan KTP baru sesudah pindah alamat. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah, penduduk wajib melaporkan/mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh kartu keluarga (KK) dan atau kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Pelayanan / pendaftaran diri di tempat yang baru dilakukan oleh pengurus RT/RW, lurah dan camat setempat, serta Dinas/Instansi yang diwajibkan khusus bagi WNA dan bagi penduduk yang terlibat organisasi terlarang.

Pada saat ini di kota Surakarta masih banyak penduduk yang tidak menyerahkan kembali KTP dan KK apabila pindah tempat tinggal. Kebanyakan mereka yang telah pindah mengurus KK dan KTP baru tanpa menyerahkan KK dan KTP tempat tinggal yang lama, sehingga mereka mempunyai dua buah KTP dan dua buah KK. Seharusnya hal ini ditindak tegas karena dapat mempersulit pendaftaran penduduk ataupun sensus penduduk.

Penduduk Kota Surakarta juga masih banyak yang sering terlambat dalam mengurus SK ataupun KTP setelah mereka pindah. Biasanya mereka baru mengurus KK ataupun KTP tempat tinggal yang baru apabila ada suatu keperluan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Rita Margaretha diketahui bahwa terdapat lima klasifikasi perpindahan penduduk. Klasifikasi itu antara lain :

- 1) Perpindahan penduduk dalam satu kelurahan
- 2) Perpindahan penduduk antar kelurahan dalam satu kecamatan

- 3) perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam satu Kota Surakarta
- 4) Perpindahan penduduk antar Kabupaten/ Kota dalam satu propinsi
- 5) Perpindahan antar propinsi dalam wilayah Indonesia

Perpindahan penduduk ini juga berimplikasi pada perubahan KK maupun penerbitan KK baru baik bagi anggota keluarga yang ditinggalkan di daerah asal maupun yang pindah di daerah tujuan. Begitu juga KTP juga perlu dirubah dengan alamat yang baru.

d) Tamu

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan bahwa : *"setiap tamu yang tinggal lebih dari dua hari atau 2x24 jam wajib melaporkan kepada RT maupun RW setempat"*.

Pada kenyataannya masih banyak dijumpai di sekitar masyarakat tamu yang menginap lebih dari dua hari tetapi tidak melapor ke RT ataupun RW, apalagi apabila yang menjadi tamu tersebut masih kerabat dari pemilik rumah. Sebenarnya kewajiban untuk melaporkan tamu yang menginap ini adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. jadi sebaiknya apabila ada tamu yang menginap lebih dari dua hari harus dilaporkan kepada RT maupun RW.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan bahwa : *Setiap tamu yang tinggal di Kota Surakarta lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Lurah setempat agar memperoleh Kartu Identitas Tamu (KIT).*

Kartu Identitas Tamu (KIT) adalah kartu yang memuat data kependudukan setiap tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal di wilayah Kota Surakarta dan tidak ingin menjadi penduduk

tetap. Prosedur untuk mendapatkan Kartu Identitas Tamu (KIT) adalah sebagai berikut :

1) Pemohon berkewajiban :

- (a) Mengisi formulir permohonan KIT dan ditanda tangani oleh pemohon
- (b) Melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan, yaitu :
 - (1) Surat keterangan dari RT/RW dimana ia bertamu;
 - (2) Fotocopy KTP daerah asal atau bukti diri;
 - (3) Surat Keterangan dari Kepala Desa /Kelurahan asal;
 - (4) Fotocopy KK yang ditempat;
 - (5) Pas photo ukuran 2x3 sebanyak tiga lembar

2) Kelurahan berkewajiban :

- (a) Menerima dan meneliti berkas permohonan KIT serta mengetahui dengan menandatangani
- (b) memberikan resi tanda terima permohonan
- (c) Menyiapkan dan mengirimkan berkas permohonan dan persyaratan ke Kecamatan

3) Kecamatan berkewajiban :

- (a) Menerima, meneliti berkas permohonan KIT yang diterima dari kelurahan
- (b) Melakukan perekaman data sesuai dengan berkas permohonan
- (c) Menarik retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (d) menerbitkan KIT dan menyerahkan hasilnya kepada Camat untuk ditanda tangai
- (e) Mangirimkan hasilnya ke kelurahan untuk diberikan kepada pemohon.

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Seperti yang telah penulis jelaskan di muka, bahwa bahwa akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor. 6 tahun 2002 dijelaskan bahwa yang merupakan akta catatan sipil adalah akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan dan pengesahan anak.

a) Akta Kelahiran

Ketentuan mengenai pencatatan akta kelahiran diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor. 6 tahun 2002. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 hari sejak adanya suatu kelahiran harus dilaporkan kepada lurah
- 2) Berdasarkan Surat keterangan yang ada Lurah mencatat kelahiran tersebut ke dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga
- 3) Sebagai bukti pelaporan kelahiran, Lurah memberikan surat kelahiran
- 4) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap.

Prosedur untuk memperoleh akta kelahiran secara langsung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, kemudian pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran dari Dinas, yang diketahui Lurah dan Camat dimana orang tua bertempat tinggal.
- 2) Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut

- (a) Surat keterangan kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap.
 - (b) Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang membantu proses kelahiran.
 - (c) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang bermeterai cukup).
 - (d) Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
 - (e) Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
 - (f) Apabila akta perkawinan atau surat nikah orang tua belum tercatat sebagai WNI maka dilengkapi bukti kewarganegaraan orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (g) Fotocopy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 - (h) Surat kuasa yang bermeterai cukup, bagi yang menguasai.
- 3) Bagi pemohon kelahiran baru yang dikuasakan mengisi surat kuasa pencatatan kelahiran bermeterai cukup.
 - 4) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima dan meneliti persyaratan tersebut.
 - 5) Setelah persyaratan tersebut lengkap dan benar, maka selanjutnya akan dicatat dan diproses oleh petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam register kelahiran. Setelah itu pemohon dan

saksi-saksi menandatangani register akta tersebut dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

- 6) Kemudian register dan kutipan akta yang telah ditandatangani tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon.
- 7) Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran adalah tujuh hari kerja

Salah satu ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi untuk mendapat akta kelahiran antara lain adanya batas waktu pelaporan setelah kelahiran terjadi. Selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran terjadi bagi warga Negara Indonesia (WNI) dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga negara Asing (WNA). Bagi yang terlambat mendaftarkan maka harus disertai dengan surat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas bagi WNI dan harus dengan keputusan pengadilan bagi WNA. Prosedur penerbitan akta Kelahiran ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Untuk biaya pembuatan akta kelahiran ini yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebesar Rp. 20.000,- untuk WNI dan sebesar Rp. 40.000,- untuk WNA. Tetapi ketentuan ini telah dirubah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. dimana dalam Perda tersebut merubah ketentuan mengenai besarnya tarif pembuatan akta kelahiran menjadi gratis. Jadi di Kota Surakarta untuk mendapatkan akta kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dipungut biaya atau gratis.

Akta kelahiran ini nantinya juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus akta-akta catatan sipil yang lain. Jadi setiap masyarakat harus mempunyai akta kelahiran.

b) Akta Kematian

Apabila seorang penduduk meninggal dunia, keluarganya wajib melapor kepada Lurah untuk dibuatkan Surat Kematian, yang nantinya surat kematian tersebut akan dipergunakan untuk memproses menjadi akta kematian. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Untuk memperoleh akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tata caranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan dan pemberitahuan kematian di Surakarta yang diketahui Lurah dan Camat dimana orang yang meninggal berdomisili
- 2) Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau puskesmas dan kelurahan dimana orang yang meninggal berdomisili yang mencantumkan diagnosa.
 - (b) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan apabila yang meninggal sudah menikah
 - (c) Fotocopy akta kelahiran yang meninggal dunia
 - (d) Apabila akta catatan sipil belum mencantumkan WNI maka dilengkapi bukti Pewarganegaraannya
 - (e) Fotocopy KK dan KTP pelapor

- (f) Apabila yang meninggal WNA maka harus dilengkapi dengan dokumen imigrasinya
 - (g) Dua orang saksi dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya
 - (h) Surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakannya
- 3) Pemohon membayar retribusi pencatatan kematian, yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi pemohon akta kematian untuk WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk akta kematian WNA.
 - 4) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta akan menerima permohonan dan kemudian akan meneliti semua persyaratan, apakah semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap atau belum.
 - 5) Setelah persyaratan sudah lengkap dan benar maka selanjutnya akan dicatat dalam register kematian dan ditandatangani oleh pemohon dan saksi, setelah itu akan diterbitkan kutipan akta kematian.
 - 6) Kemudian register kematian dan kutipan akta tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta kematian akan diserahkan kepada pemohon
 - 7) Akta kematian diterbitkan paling lambat tujuh hari.

Seperti halnya akta kelahiran, Salah satu ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi untuk mendapat akta kelahiran antara lain adanya batas waktu pelaporan setelah kelahiran terjadi. Selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran terjadi bagi warga Negara Indonesia (WNI) dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga negara Asing (WNA). Bagi yang terlambat mendaftarkan maka

harus disertai dengan surat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas bagi WNI dan harus dengan keputusan pengadilan bagi WNA.

Untuk membuat akta kematian ini tidak gratis seperti halnya akta kelahiran. Biaya untuk membuat akta kematian ini adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi pemohon akta kematian untuk WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk akta kematian WNA. Ketentuan mengenai prosedur penerbitan akta kematian ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil

c) Akta Perkawinan

Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain agama Islam agar perkawinan sah secara agama dan juga sah secara hukum Negara, maka harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinannya.

Jadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dan menerbitkan akta perkawinan hanya perkawinan bagi warga yang beragama non islam. Karena perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dicatat oleh instansi lain yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama.

Prosedur untuk penerbitan akta perkawinan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan pencatatan perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- 2) Pemohon harus melampirkan persyaratan-persyaratan seperti yang telah tersebut di atas untuk kemudian didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 3) Pemohon membayar retribusi dan biaya operasional petugas pencatat perkawinan.
- 4) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan, apakah sudah sesuai dan benar atau belum.
- 5) Setelah berkas lengkap dan benar maka akan diproses oleh Kasi Perkawinan dan Perceraian.
- 6) 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pencatatan akan diadakan pengumuman perkawinan
- 7) Setelah diketahui tidak ada sanggahan atau keberatan terhadap perkawinan yang telah diumumkan, maka petugas pencatat akan segera meminta persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melangsungkan sidang pencatatan perkawinan.
- 8) Setelah itu akta perkawinan akan segera diproses, dan diterbitkan kutipannya.
- 9) Kemudian register dan kutipan akta tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 10) Petugas akan segera memulai sidang pencatatan perkawinan.
- 11) Akta perkawinan akan disimpan di Dinas, sedangkan kutipan akta perkawinan akan diberikan kepada pemohon.
- 12) Jangka waktu penyelesaian paling lambat adalah 7 tujuh hari kerja.

Besarnya biaya retribusi dan biaya operasional untuk pembuatan akta perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan di dalam kantor

WNI : Rp. 52.000,-

WNA : Rp. 77.000,-

- 2) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan di luar kantor

WNI : Rp. 75.000,-

WNA : Rp. 117.000,-

- 3) Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan pada hari libur

WNI : Rp. 75.000,-

WNA : Rp. 117.000,-

- 4) Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (dalam kantor)

WNI : Rp. 75.000,-

WNA : Rp. 125.000,-

- 5) Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (luar kantor)

WNI : Rp. 100.000,-

WNA : Rp. 175.000,-

- 6) Operasional petugas pencatatan perkawinan

WNI : Rp. 25.000,-

WNA : Rp. 100.000,-

Pada prakteknya agar lebih praktis, pelaksanaan sidang pencatatan biasanya dilakukan di Gereja, Pure, atau Vihara sesaat setelah

dilangsungkannya pemberkatan perkawinan oleh pemuka agamanya masing-masing. Dan setelah sidang pencatatan tersebut kutipan akta perkawinan akan langsung diberikan setelah ditanda tangani oleh kedua mempelai dan dua orang saksi.

Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, juga berkewajiban untuk melaporkan perkawinannya. Sedangkan jangka waktu untuk pelaporan perkawinan yang terjadi diluar Indonesia adalah paling lambat satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia. Untuk pelaporan perkawinan ini akan diterbitkan bukti pelaporan luar negeri, dan bukan akta perkawinan. Ketentuan mengenai akta perkawinan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

d) Akta Perceraian

Setiap peristiwa perceraian warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beragama non Islam harus didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelum didaftarkan, maka perceraian tersebut harus mendapat putusan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Jangka waktu pendaftaran perceraian paling lambat adalah satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pendaftaran perceraian melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya retribusi tambahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Rita Margaretha. Prosedur penerbitan akta perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili

- 2) Setelah mendapat putusan pengadilan, pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dari Dinas.
 - 3) Pemohon melampirkan persyaratan-persyaratan, yang meliputi :
 - (a) Fotocopy KTP pemohon
 - (b) Pengantar dari pengadilan
 - (c) Salinan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - (d) Kutipan akta perkawinan
 - (e) Bagi WNA, maka harus melampirkan dokumen imigrasi
 - 4) Pemohon membayar biaya retribusi yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA. Sedangkan untuk pencatatan perceraian yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka besarnya biaya adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk WNA.
 - 5) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan
 - 6) Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan mencatat dalam register akta perceraian dan ditandatangani oleh pemohon dan diterbitkan kutipan akta perceraian untuk diberikan kepada pemohon
 - 7) Jangka waktu penyelesaian adalah 7 tujuh hari kerja
- e) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan (anak luar kawin), apabila diakui oleh ayahnya dan disetujui

oleh ibunya dapat dicatatkan dalam akta pengakuan anak. Setiap anak yang telah mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya apabila orang tuanya melangsungkan perkawinan, maka dapat dicatatkan dalam akta pengesahan anak (Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil).

Proses penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir dari Dinas
- 2) Pemohon melampirkan semua persyaratan, antara lain :
 - (a) Akta kelahiran anak
 - (b) Fotocopy KK dan KTP orang tua yang memohon pengakuan dan pengesahan anak
 - (c) Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal jika orang tua lalai dalam permohonan sehingga pencatatan dilakukan setelah perkawinan (untuk pengesahan anak).
- 3) Pemohon membayar biaya retribusi, yaitu sebesar :
 - (a) Akta pengakuan anak untuk WNI adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (b) Akta pengesahan anak untuk WNI adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima dan meneliti semua berkas dan persyaratan.

- 5) Setelah persyaratan benar dan lengkap, maka akan dilakukan catat pinggir di register dan akta kelahiran anak untuk pengakuan anak dan akta perkawinan orang tuanya untuk pengesahan anak.
- 6) Kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak diberikan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

Sebenarnya selain pengakuan dan pengesahan anak, bisa juga hanya pengakuan anak saja, jadi anak hanya sebatas diakui saja, tidak di sahkan dan orang tuanya tidak menikah. Prosedurnya hampir sama dengan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, sama-sama diberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak, tetapi harus memerlukan penetapan Pengadilan Negeri

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil diperoleh hasil bahwa untuk Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Perpindahan Penduduk, Tamu. Sedangkan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

C. Faktor-Faktor Penghambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

1. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagai upaya menciptakan tertib administrasi di wilayah Kota Surakarta ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Timbul beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Rita Margaretha selaku Kepala Seksi Perencanaan Sub Dinas Bina Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta diketahui bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil antara lain :

- a) Masyarakat masih banyak yang belum mengerti prosedur penerbitan kartu kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Di Kota Surakarta saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum begitu mengerti dan memahami prosedur untuk memperoleh kartu kependudukan (KTP, KK) maupun akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak). Masyarakat kadang-kadang merasa dipersulit dalam mengurus akta catatan sipil. Karena harus bolak-balik ke kelurahan. Sehingga timbul suatu opini dalam masyarakat bahwa mengurus kartu kependudukan (KK, KTP) maupun akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sulit dan berbelit-belit.

Tidak jarang warga masyarakat yang malas untuk mengurus sendiri secara langsung penerbitan kartu kependudukan maupun akta catatan sipil menggunakan jasa calo. Tentunya dengan menggunakan jasa calo ini warga masyarakat tinggal menerima hasilnya saja. Tapi dengan menggunakan jasa calo ini tentunya menggunakan biaya yang lebih mahal juga. Padahal jika mau datang dan mengurus sendiri penerbitannya di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta biaya yang digunakan bisa menjadi murah. Misalnya saat ini apabila mengurus penerbitan akta kelahiran secara langsung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dikenakan biaya atau gratis. Tapi dengan menggunakan jasa calo biasanya akan dikenakan tarif sekitar Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-.

Contoh lain yang sering terjadi di masyarakat adalah bila membuat KTP maupun KK. Biasanya untuk mengurus KTP ataupun KK pemohon tidak langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tapi melalui kelurahan agar diurus kelurahan sampai selesai. Padahal jika pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, pemohon hanya akan dikenai biaya pembuatan KTP ataupun KK sebesar Rp. 5.000,- saja. Sedangkan jika pemohon KTP atau KK mengurus penerbitan KTP atau KK menggunakan jasa kelurahan, tentunya dikenakan biaya lebih sekitar Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-.

Jadi hendaknya masyarakat mengetahui tata cara penerbitan untuk mengurus kartu kependudukan (KTP, KK) maupun akta catatan sipil, sehingga dapat langsung mengurus penerbitannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta jika membutuhkannya.

b) Banyak warga masyarakat yang memiliki KTP dan KK ganda

Di Kota Surakarta saat ini banyak masyarakat yang memiliki KTP atau KK lebih dari satu. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa masyarakat yang pindah alamat tetapi berbeda Kota mengurus KTP dan KK baru tetapi tidak mengembalikan atau menyerahkan KK ataupun KTP yang lama.

Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, telah dijelaskan bahwa :

- 1) Apabila terjadi perpindahan sebuah keluarga, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk yang dimiliki keluarga yang bersangkutan wajib diserahkan kembali atau dicabut.
- 2) Apabila terjadi perpindahan sebagian anggota keluarga dan yang pindah memiliki KTP, maka KTP-nya wajib diserahkan kembali / dicabut.

Melihat dari ketentuan tersebut adalah wajib bahwa apabila terjadi perpindahan keluarga maka KTP dan KK yang lama harus diserahkan kembali ataupun dicabut. Dengan kepemilikan KK dan KTP ganda ini juga menyebabkan kekacauan dalam sensus penduduk. Sebagai contoh pada saat pemilu banyak yang memperoleh lebih dari satu kartu pemilih, karena memiliki dua domisili yang berbeda. Sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu. Contoh lain apabila pada saat pemilihan kepala desa atau kelurahan, kadang-kadang warga yang sudah tidak berdomisili di wilayah atau desa tersebut mendapat kartu pemilih karena masih mempunyai KK ataupun KTP dari desa tersebut.

Untuk menciptakan tertib administrasi dan kependudukan maka alangkah baiknya warga yang sudah pindah rumah hendaknya menyerahkan KK dan KTP yang lama, sehingga tercipta tertib administrasi khususnya di bidang Kependudukan.

- c) Banyak tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam tapi tidak melapor

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dijelaskan bahwa : *"setiap tamu yang tinggal lebih dari dua hari atau 2x24 jam wajib melaporkan kepada RT maupun RW setempat"*.

Pada kenyataannya masih banyak dijumpai di sekitar masyarakat tamu yang menginap lebih dari dua hari tetapi tidak melapor ke RT ataupun RW, apalagi apabila yang menjadi tamu tersebut masih kerabat dari pemilik rumah. Sebenarnya kewajiban untuk melaporkan tamu yang

menginap ini adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. jadi sebaiknya apabila ada tamu yang menginap lebih dari dua hari harus dilaporkan kepada RT maupun RW.

- d) Warga masyarakat masih banyak yang belum sadar akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil

Akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain : akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta-akta catatan sipil tersebut mempunyai manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila ada peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perceraian, dan pernikahan alangkah baiknya sesegera mungkin segera dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk diterbitkan menjadi akta catatan sipil.

Di Kota Surakarta masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya arti dan manfaat akta-akta catatan sipil tersebut. Jadi masih banyak masyarakat yang sering terlambat dalam mengurus penerbitan akta-akta catatan sipil tersebut. Biasanya bagi masyarakat yang terlambat mengurus tersebut baru mengurus penerbitan akta-akta catatan sipil tersebut apabila ada masalah ataupun keperluan yang mendesak. Misalnya anak mau masuk dan mendaftar sekolah baru dicarikan akta kelahiran. Seorang Duda atau Janda mau menikah lagi, baru dicarikan akta perceraian.

2. Solusi

Ada beberapa cara atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Solusi tersebut antara lain :

- a) Memasang gambar alur penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan sipil di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan membuka *line* telepon bagi masyarakat umum.

Untuk membantu warga masyarakat yang kurang mengerti prosedur penerbitan kartu-kartu kependudukan dan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta telah terpasang alur untuk memperoleh akta-akta tersebut, jadi masyarakat dapat datang langsung dan mengikuti petunjuk alur tersebut untuk memperoleh kartu kependudukan (KTP, KK) maupun akta-akta catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga menyediakan *line* telepon bagi warga masyarakat yang hendak menanyakan syarat maupun prosedur untuk memperoleh akta-akta catatan sipil. Dengan diadakannya atau dipasangnya gambar alur penerbitan akta-akta catatan sipil dan *line* telp, diharapkan masyarakat yang hendak mengurus atau membuat kartu-kartu kependudukan (KTP, KK) maupun akta-akta catatan sipil dapat mengurusnya sendiri dan datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

- b) Diadakan Pendataan KTP atau KK

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan di kota Surakarta mengadakan pendataan KTP dan KK. Jadi pendataan ini juga untuk mengetahui penduduk yang benar-benar tinggal dan menetap di suatu daerah, ataupun penduduk yang sudah pindah. Jadi dengan pendataan ini akan dapat diketahui jumlah penduduk tetap maupun yang sudah pindah.

Melalui pendataan ini keluarga yang ada anggotanya sudah pindah ke daerah lain, maka Kartu-seluarganya akan diperbaharui, sehingga di

Kartu Keluarga hanya akan tertulis nama anggota keluarga yang benar-benar tinggal di daerah tersebut. Jadi dengan adanya program pendataan KTP dan KK ini dapat meminimalkan terjadinya KTP maupun KK ganda.

- c) Dipasang pasang pengumuman tamu menginap 1x 24 jam wajib lapor di setiap desa atau kelurahan

Di setiap wilayah dan kelurahan dipasang papan pengumuman "Tamu menginap 2 x 24 jam wajib lapor RT atau RW". Dengan adanya papan pengumuman ini diharapkan jika ada tamu yang menginap maka warga yang bersangkutan dapat melapor RT atau RW. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Jadi hendaknya warga yang mendapai tamu yang menginap lebih dari 1x 24 jam wajib untuk melapor ke RT ataupun RW.

- d) Diadakan sosialisasi dan berbagai penyuluhan mengenai arti penting dan mafaat akta-akta catatan sipil

Dinas Kependudukan sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai akta-akta catatan sipil. Selain itu juga melalui program-program dialog Interaktif melalui radio dan televisi. Biasanya penyuluhan-penyuluhan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali. Untuk mempermudah dalam proses penerbitan akta catatan sipil, Dinas kependudukan dan catatan Sipil mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi. Misalnya : kerjasama dengan rumah sakit seperti Rumah Sakit PKU, dr. Oen, Panti Waluyo dalam penerbitan akta kelahiran. Jadi apabila ada bayi yang lahir dapat langsung mengurus penerbitan akta kelahirannya melalui rumah sakit tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disini penulis menyimpulkan beberapa hal. yaitu :

1. Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Perpindahan Penduduk, Tamu. Sedangkan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meliputi : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :
 - a) Masyarakat masih banyak yang belum mengerti prosedur penerbitan kartu kependudukan dan akta-akta catatan sipil
 - b) Banyak warga masyarakat yang memiliki KTP dan KK ganda
 - c) Banyak tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam tapi tidak melapor
 - d) Warga masyarakat masih banyak yang belum sadar akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil

Solusi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

71

- a) Memasang gambar alur penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan sipil di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan membuka *line* telepon bagi masyarakat umum
- b) Diadakan Pendataan KTP atau KK

- c) Dipasang pasang pengumuman tamu menginap 1x 24 jam wajib lapor di setiap desa atau kelurahan
- d) Diadakan sosialisasi dan berbagai penyuluhan mengenai arti penting dan mafaat akta-akta catatan sipil

B. Saran-Saran

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai akta-akta catatan sipil, sehingga masyarakat mengerti manfaat dan cara mendapatkan akta catatan sipil.
2. Mengingat pentingnya akta catatan sipil, hendaknya masyarakat mengurus setiap penerbitan akta-akta catatan sipil secara tepat waktu.
3. Untuk mencegah dan mengurangi pemilik KTP Ganda Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bekerja sama dengan instansi pemerintah mengadakan pendataan ulang penduduk.
4. Pemerintah menindak tegas pelaku calo akta-akta kependudukan dan catatan sipil

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- HB Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Pusat Penelitian Surakarta
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni
- Lexi J Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moh. Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Sarundajang. 2002. *Pemerintah Daerah di berbagai Negara*. Jakarta: PT Penebar Swadaya

Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

_____, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno Surachman, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

Anonim.2003.*Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil